



LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2021



DINAS ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NTB

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iv
NERACA	v
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	vi
LAPORAN OPERASIONAL.....	vii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	viii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
A. BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	4
1.3 Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan	7
B. BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	9
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	9
2.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja	10
C. BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI	12
3.1 Entitas Akuntansi Keuangan	13
3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	13
3.3 Basis Pengakuan Yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan	13
3.4 Basis Pengukuran Yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan	20
3.5 Penyajian Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah	36
D. BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	41
4.1 Komponen – Komponen Akun Neraca	41
4.1.1 Aset	41
4.1.2 Kewajiban	47
4.1.3 Ekuitas	47
4.2 Komponen – Komponen Akun Laporan Realisasi Anggaran ...	48
4.2.1 Pendapatan	48
4.2.2 Belanja	48
4.2.3 Pembayaran	52
4.3 Komponen-komponen Laporan Operasional	53
4.4 Komponen-Komponen Laporan Perubahan Ekuitas	58
E. BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	59
F. BAB VI PENUTUP	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1.1	Daftar Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran
Lampiran	1.2	Daftar SP2D LS di Rekening Bendahara Pengeluaran
Lampiran	1.3	Daftar Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan
Lampiran	2	Rekapitulasi Piutang Pajak Air Bawah Tanah
Lampiran	3	Rekapitulasi Persediaan
Lampiran	6.1	Rekapitulasi Aset Tetap
Lampiran	6.2	Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap-Tanah
Lampiran	6.3	Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap-Peralatan Mesin
Lampiran	6.4	Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap-Gedung dan Bangunan
Lampiran	6.5	Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan
Lampiran	6.6	Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya
Lampiran	6.7	Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap-Konstruksi Dalam Penggerjaan
Lampiran	7	Rekapitulasi Aset Lainnya
Lampiran	11	Rekapitulasi Utang Beban TA. 2021
Lampiran	12	Rekapitulasi Utang Pengadaan Barang dan Jasa TA.2021
Lampiran	13	Rekapitulasi Kertas Kerja LPE TA.2021



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Majapahit No. 40 MATARAM – 83010

KATA PENGANTAR

Sesuai Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021 dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021. Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Keuangan kepada Gubernur melalui PPKD sebagai Laporan Peranggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pada masing - masing Organisasi Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami sampaikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui PPKD antara lain sebagai berikut :

1. Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2021, (menyajikan penjelasan mengenai anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja Organisasi Perangkat Daerah beserta prosentasenya).
2. Neraca Tahun 2021, (menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Organisasi Perangkat Daerah per 31 Desember 2021).
3. Laporan Operasional Tahun 2021.
4. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2021.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2021, (menyajikan informasi tentang uraian ikhtisar pencapaian kinerja,kebijakan akuntansi dan penjelasan pos-pos laporan keuangan)

Mataram, Januari 2022

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



H. MAINAL ABIDIN, M.Si
NIP: 19640614 199303 1 007



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Majapahit No. 40 MATARAM – 83010

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mataram, Januari 2022

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT





NERACA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Per 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan	: 3 . 05	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral	
Unit Organisasi	: 3 . 05 . 01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
Sub Unit Organisasi	: 3 . 05 . 01 . 01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
URAIAN		2021	2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Kas di BLUD		0,00	0,00
Kas Dana BOS		0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Setara Kas		0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah		19.268.027,00	19.268.027,00
Piutang Retribusi Daerah		0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah		0,00	0,00
Piutang Lainnya		0,00	0,00
Penyisihan Piutang		(19.268.027,00)	(19.268.027,00)
Beban Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Persediaan		46.663.528,35	46.663.528,35
JUMLAH ASET LANCAR		46.663.528,35	46.663.528,35
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara		0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah		0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi		0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
Dana Bergulir		0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang		0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyertaan Modal		0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen		0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		0,00	0,00
ASET TETAP			
Tanah		4.067.700.000,00	4.067.700.000,00
Peralatan dan Mesin		7.646.378.499,44	7.550.364.499,44
Gedung dan Bangunan		8.050.968.762,84	8.050.968.762,84
Jalan, Jaringan, dan Irigasi		669.979.600,00	669.979.600,00
Aset Tetap Lainnya		105.573.900,00	105.573.900,00
Konstruksi Dalam Penggerjaan		34.787.000,00	34.787.000,00
Akumulasi Penyusutan		(11.427.493.731,44)	(10.989.117.681,44)
JUMLAH ASET TETAP		9.147.894.030,84	9.490.256.080,84
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASET LAINNYA			
Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Lain-lain		503.654.948,00	503.654.948,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(492.322.981,00)	(492.322.981,00)
JUMLAH ASET LAINNYA		11.331.967,00	11.331.967,00

Urusan Pemerintahan	: 3 . 05	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
Unit Organisasi	: 3 . 05 . 01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi	: 3 . 05 . 01 . 01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
URAIAN	2021	2020
JUMLAH ASET	9.205.889.526,19	9.548.251.576,19
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	241.756.095,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	241.756.095,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	241.756.095,00	0,00
EKUITAS		
EKUITAS	8.964.133.431,19	9.548.251.576,19
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	9.205.889.526,19	9.548.251.576,19

Mataram, 31 Desember 2021

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Ir. ZAINAL ABIDIN, M.S

NIP. 19640614 199303 1 007



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
WILAYAH PULAU SUMBAWA
Jl. Manggis No. 11 Sumbawa (kodepos 84317)

Telp. (0371) 22148

Fax. (0371) 22148

NERACA
Per 31 Desember 2020 dan 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021		2020	
		4	5	6	7
1	ASET				
2	ASSET LANCAR				
3	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Setara kas	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Piutang Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
16	JUMLAH ASSET LANCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
17	INVESTASI JANGKA PANJANG				
18	Investasi Jangka Panjang Non Permanen				
19	Investasi Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Investasi Dalam opsi/garis	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Investasi Dalam Projek Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Investasi non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Investasi Jangka Panjang Permanen				
27	Penyerahan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ASET TETAP				
32	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Konstruksi Dalam Penggerakan	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00	0,00	0,00
39	JUMLAH ASET TETAP	0,00	0,00	0,00	0,00
40	DANA CADANGAN				
41	Dana cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
43	JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ASET	0,00	0,00	0,00	0,00
45	KEWAJIBAN				
46	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
47	Utang Perhitungan Pihak ketiga PFK	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Utang Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
54	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
55	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Utang Jangka panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
57	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Jumlah Kewajiban	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Ekuitas				
60	Ekuitas	0,00	0,00	0,00	0,00
61	JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS DANA	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumbawa Besar, 31 Desember 2021
Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Wilayah Pulau Sumbawa

Iwan Setiawan, ST
NIP. 19780726 200501 1 010





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Urusan Pemerintahan	: 3	Urusan Pilihan			
Bidang Pemerintahan	: 3 . 05	Energi dan Sumberdaya Mineral			
Unit Organisasi	: 3 . 05 . 01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral			
Sub Unit Organisasi	: 3 . 05 . 01 . 01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral			
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	0,00	0,00	0,00
4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	9.800.074.195,00	9.281.450.296,00	94,71	11.436.353.926,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	9.734.383.095,00	9.216.936.296,00	94,68	11.183.478.326,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	7.323.075.635,00	7.180.246.442,00	98,05	6.804.735.862,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.411.307.460,00	2.036.689.854,00	84,46	1.754.572.186,00
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	2.624.170.278,00
5 . 2	BELANJA MODAL	65.691.100,00	64.514.000,00	98,21	252.875.600,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.691.100,00	64.514.000,00	98,21	70.378.000,00
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	182.497.600,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.800.074.195,00)	(9.281.450.296,00)	94,71	(11.436.353.926,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(9.800.074.195,00)	(9.281.450.296,00)	94,71	(11.436.353.926,00)
Mataram, 31 Desember 2021					
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT					
					
Ir. ZAINAL ABIDIN, M. Si					
NIP. 19640614 199303 1 007					
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH			Halaman 1 dari 1		



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
WILAYAH PULAU SUMBAWA
Jl. Manggis No. 11 Sumbawa (kodepos 84317)

Telp. (0371) 22148

Fax. (0371) 22148

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	BELANJA 2020
1	2	4	5		
5	BELANJA DAERAH	299.492.300,00	280.435.533,00	93,64	0,00
5.1	BELANJA OPERASI	299.492.300,00	280.435.533,00	93,64	0,00
5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	299.492.300,00	280.435.533,00	93,64	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(299.492.300,00)	(280.435.533,00)	93,64	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(299.492.300,00)	(280.435.533,00)	93,64	0,00

Sumbawa Besar, 31 Desember 2021

Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Wilayah Pulau Sumbawa





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Urusan Pemerintahan	: 3	Urusan Pilihan			
Bidang Pemerintahan	: 3 . 05	Energi dan Sumberdaya Mineral			
Unit Organisasi	: 3 . 05 . 01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral			
Sub Unit Organisasi	: 3 . 05 . 01 . 01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral			
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
7	KEGIATAN OPERASIONAL				
7 . 1	PENDAPATAN - LO	0,00	39.475.822,00	(39.475.822,00)	(100,00)
7 . 1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 1 . 2	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 1 . 3	Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 1 . 4	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 1 . 5	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	0,00	39.475.822,00	(39.475.822,00)	(100,00)
7 . 3 . 1	Pendapatan Hibah-LO	0,00	39.475.822,00	(39.475.822,00)	(100,00)
7 . 3 . 2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 3 . 3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BEBAN	9.892.868.441,00	17.361.196.073,65	(7.468.327.632,65)	(43,02)
8 . 1 . 1	Beban Pegawai	7.394.462.237,00	6.804.735.862,00	589.726.375,00	8,67
8 . 1 . 2	Beban Barang dan Jasa	2.064.230.154,00	7.333.888.418,65	(5.269.658.264,65)	(71,85)
8 . 1 . 3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 5	Beban Hibah	0,00	2.750.653.222,00	(2.750.653.222,00)	(100,00)
8 . 1 . 6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 7	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 8	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	296.732.684,00	338.023.770,00	(41.291.086,00)	(12,22)
8 . 2 . 2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	121.104.951,00	121.104.951,00	0,00	0,00
8 . 2 . 3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	16.338.415,00	12.789.850,00	3.548.565,00	27,75
8 . 2 . 4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan	: 3	Urusan Pilihan			
Bidang Pemerintahan	: 3 . 05	Energi dan Sumberdaya Mineral			
Unit Organisasi	: 3 . 05 . 01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral			
Sub Unit Organisasi	: 3 . 05 . 01 . 01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral			
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/(PENURUNAN)	(%)
8 . 3 . 1	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 2	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(9.892.868.441,00)	(17.321.720.251,65)	7.428.851.810,65
					(42,89)
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7 . 4 . 1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 5 . 1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 5 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(9.892.868.441,00)	(17.321.720.251,65)	7.428.851.810,65
					(42,89)
	POS LUAR BIASA				
8 . 4 . 1	Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS/DEFISIT-LO	(9.892.868.441,00)	(17.321.720.251,65)	7.428.851.810,65
					(42,89)
Mataram, 31 Desember 2021					
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT					
					
Ir. ZAINAL ABIDIN, M.Si NIP. 19640614 199303 1 007					
LAPORAN OPERASIONAL	Halaman 2 dari 2				



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
WILAYAH PULAU SUMBAWA
Jl. Manggis No. 11 Sumbawa (kodepos 84317)

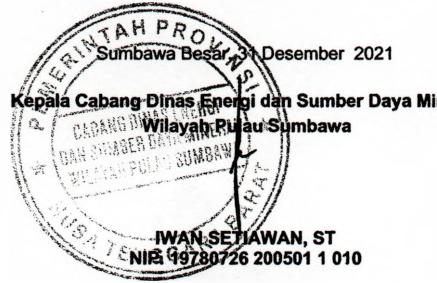
Telp. (0371) 22148

Fax. (0371) 22148

**LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KEMAJUAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	4	5		
8	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	280.435.533,00	0,00	280.435.533,00	0,00
9.1.1	Beban Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	280.435.533,00	0,00	280.435.533,00	0,00
9.1.2	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.8	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.10	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.11	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.12	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(280.435.533,00)	0,00	(280.435.533,00)	0,00
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00			
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(280.435.533,00)	0,00	(280.435.533,00)	0,00
	POS LUAR BIASA				
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00		0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(280.435.533,00)	0,00	(280.435.533,00)	0,00



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT****LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan	:	3 . 05	Energi dan Sumberdaya Mineral
Unit Organisasi	:	3 . 05 . 01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi	:	3 . 05 . 01 . 01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
URAIAN		2021	2020
EKUITAS AWAL		9.548.251.576,19	15.433.617.901,84
SURPLUS/DEFISIT-LO		(9.892.868.441,00)	(17.321.720.251,65)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:			
Koreksi Nilai Persediaan		0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya		0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN		9.308.750.296,00	11.436.353.926,00
EKUITAS AKHIR		8.964.133.431,19	9.548.251.576,19

Mataram, 31 Desember 2021

**KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT****Ir. ZAINAL ABIDIN, M.Si**

NIP. 19640614 199303 1 007



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
WILAYAH PULAU SUMBAWA
Jl. Manggis No. 11 Sumbawa (kodepos 84317)

Telp. (0371) 22148

Fax. (0371) 22148

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2021	2020
2	4	5
EKUITAS AWAL	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(280.435.533,00)	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	280.435.533,00	0,00
EKUITAS AKHIR	0,00	0,00

Sumbar Besar, 31 Desember 2021
Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Wilayah Pulau Sumbawa

IWAN SETIAWAN, ST
NIP. 197807262005011010

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Adapun tujuan laporan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi

keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuannya adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan arus kas sebagai suatu entitas pelaporan.

Komponen Laporan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai lampiran I PSAP No.01 - PP 71 Tahun 2010 terdiri dari (a) Neraca (b) Laporan Realisasi Anggaran; (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus/defisit -LRA
- e. Pembiayaan

- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Entitas akuntansi mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Entitas akuntansi mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut:

- a. Kas dan Setara Kas
- b. Investasi Jangka Pendek
- c. Piutang Pajak dan Bukan Pajak
- d. Persediaan
- e. Investasi Jangka Panjang
- f. Aset Tetap
- g. Kewajiban Jangka Pendek
- h. Kewajiban Jangka Panjang
- i. Ekuitas Dana

Pos-pos selain yang disebutkan di atas, disajikan dalam neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas akuntansi.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut ;

- a. Pendapatan -LO dari kegiatan operasional
- b. Beban dari kegiatan operasional
- c. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional , bila ada
- d. Pos luar biasa bila ada
- e. Surplus/defisit-LO

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos ;

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/Defisit - LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi langsung yang menambah /mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak komulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya
 1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode berikutnya.
 2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
- d. Ekuitas akhir.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan mencakup hal- hal sebagai berikut:

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi Penjelasan atau daftar atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekiutas, dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1649;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan.
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023

26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
27. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Kedua atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 53);
29. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 54 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 54);

1.3 SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 3.1. Entitas Akuntansi Keuangan
- 3.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3. Basis Pengakuan Yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4. Basis Pengukuran Yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.5. Penyajian Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.

- 4.1. Komponen-Komponen Akun Neraca
 - 4.1.1. Aset
 - 4.1.2. Kewajiban

- 4.1.3. Ekuitas
- 4.2. Komponen-Komponen Akun Laporan Realisasi Anggaran
 - 4.2.1. Pendapatan
 - 4.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah
 - 4.2.2. Belanja
 - 4.2.2.1 Belanja Operasi
 - 4.2.2.2. Belanja Modal
 - 4.2.3. Pembiayaan
- 4.3. Komponen-Komponen Laporan Operasional
 - 4.3.1. Kegiatan Operasional
 - 4.3.1.1. Pendapatan LO
 - 4.3.1.2. Beban
- 4.4. Komponen-Komponen Laporan Perubahan Ekuitas
 - 4.4.1. Laporan Perubahan Ekuitas

BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VI PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja SKPD merupakan gambaran dari persentase tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan SKPD selaku entitas akuntansi baik secara fisik maupun keuangan. Dari data tersebut dapat diketahui kinerja dari suatu entitas akuntansi atau SKPD dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam DPA –SKPD masing-masing.

Secara umum dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang tersedia dalam DPA bila dinilai secara fisik rata-rata pencapaian kinerjanya mencapai 100%, hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi realisasi keuangan untuk membiayai masing-masing program dan kegiatannya kurang dari 100%, hal ini disebabkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja barang serta belanja pegawai berupa belanja gaji sebagai bentuk penghematan dan merupakan prestasi bagi SKPD dalam memanfaatkan anggaran secara optimal..

A. Ikhtisar pencapaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	84,44	100,00
2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	98,01	100,00
3	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	99,83	100,00
4	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	53,32	100,00
5	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	99,93	100,00
6	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	98,21	100,00
7	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	81,46	100,00
8	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	95,31	100,00

2. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	<i>Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i>	90,47	100,00
2	<i>Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i>	96,91	100,00
3	<i>Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i>	96,46	100,00

3. *Program Pengelolaan Mineral dan Batubara*

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	<i>Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</i>	78,52	100,00
2	<i>Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat</i>	95,41	100,00
3	<i>Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan</i>	100,00	100,00

4. *Program Pengelolaan Ketenagalistrikan*

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	<i>Penatusahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi</i>	93,17	100,00
2	<i>Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi</i>	96,74	100,00
3	<i>Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</i>	79,70	100,00

5. *Program Pengelolaan Energi Terbarukan*

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	<i>Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun</i>	97,52	100,00
2	<i>Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi</i>	87,01	100,00

B. Ikhtisar pencapaian kinerja Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Pulau Sumbawa sebagai berikut :

1. *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi*

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	95,18	100,00
2	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	91,26	100,00
3	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100,00	100,00

2. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	<i>Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i>	96,79	100,00

3. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	<i>Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</i>	99,37	100,00

4. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	<i>Penatusahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi</i>	99,71	100,00

5. Program Pengelolaan Energi Terbarukan

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	<i>Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun</i>	95,47	100,00

2.2. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Ikhtisar pencapaian kinerja rata-rata hampir memenuhi target 100% hal ini karena ketersediaan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi ada juga beberapa program kegiatan yang belum mencapai 100 % dari target yang telah ditetapkan, ditunjukkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja barang serta belanja pegawai berupa belanja gaji. Hal ini akan menjadi acuan ke depan agar permasalahan ini dapat diselesaikan pada tahun berikutnya.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi tersebut disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan buletin-buletin teknisnya, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Untuk pelaporan keuangan yang ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat, asumsi dasar yang digunakan adalah:

1. *Kemandirian Entitas*, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas akuntansi merupakan unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Kesinambungan Entitas*, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas akuntansi berlanjut keberadaannya/ berkesinambungan.
3. *Keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement)*, yaitu bahwa entitas akuntansi harus menyajikan setiap kegiatan yang dapat dinilai dengan satuan uang. Mata uang yang

digunakan untuk pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan adalah mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah.

Periode Akuntansi yang digunakan untuk menyajikan informasi keuangan yaitu berdasarkan tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

3.1 ENTITAS AKUNTANSI KEUANGAN

Entitas akuntansi untuk laporan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan unit pengguna anggaran dan pengguna barang di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan.

3.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca serta pendapatan LO dan beban dalam Laporan Operasional. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan belanja, transfer serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. Basis akrual untuk Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas berarti bahwa aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan LO, dan beban diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan, tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayar.

3.3 BASIS PENGAKUAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

3.3.1 Kas diakui :

- a) Pada saat kas diterima oleh bendahara.
- b) Pada saat kas dikeluarkan oleh bendahara.

3.3.2 Piutang

1. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau mafaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.
2. Piutang dapat diakui ketika:
 - a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
 - b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihah; atau
 - c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

3. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - b. jumlah piutang dapat diukur;
 - c. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
 - d. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
4. Piutang yang berasal dari pendapatan asli daerah dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu:
 - a. piutang atas pendapatan asli daerah melalui penetapan. Piutang pendapatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Piutang dari hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah, dan Piutang Pendapatan Denda Retribusi; dan
 - b. piutang atas pendapatan asli daerah tanpa penetapan. Piutang pendapatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain Piutang Penerimaan Jasa Giro, Piutang Pendapatan Bunga Deposito, Piutang Komisi, Piutang Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Piutang Pendapatan dari Pengembalian, Piutang Piutang Retribusi atas Pemanfaatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Piutang Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Piutang Pendapatan dari penjualan hasil produksi daerah, dan Piutang Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan.

3.3.3 Persediaan

1. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

2. Pengakuan Beban Persediaan

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan asset dan pendekatan beban.

Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan asset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi,

atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit.

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

3. Selisih Persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

4.3.3 Aset Tetap

1. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
2. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
3. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. berwujud;
 - b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
 - c. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - f. merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara

4. Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.
5. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
6. Aset Tetap yang mempunyai nilai di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi, Aset Tetap tersebut dicatat dalam buku inventaris di luar pembukuan (*extracomptable*)

5.3.3 Aset Lainnya

1. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Provinsi NTB secara angsuran kepada pegawai/Kepala Daerah.
2. Tuntutan Ganti rugi diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Pembebanan Penggantian Keugian (SKP2K) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM)
3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya untuk Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa, kerjasama pemanfaatan, dan Bangun Guna Serah.
4. Bagun Serah Guna dikui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Provinsi NTB disertai dengan kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
5. Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai Aset Tak Berwujud memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.
6. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
7. Aset Lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif dan reklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

6.3.3 Kewajiban

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.
3. Kewajiban dapat timbul dari:
 - a. transaksi dengan pertukaran (exchange transactions);
 - b. transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
 - c. kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events); dan
 - d. kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).
4. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa mendatang, misalnya utang atas belanja ATK.
5. Dalam transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan, misalnya hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.
6. Kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran, misalnya ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.
7. Kewajiban diakui, dalam kaitannya dengan kejadian yang diakui pemerintah, apabila memenuhi kriteria berikut: (1) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan, (2) transaksi dengan pertukaran timbul atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan. Contohnya pemerintah daerah memerlukan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

7.3.3 Ekuitas

Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana

cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban

8.3.3 Pendapatan

1. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pendapatan LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan
3. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) maupun tidak berulang (non recurring) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

4. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki hak atas pendapatan; atau
5. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima kas yang berasal dari pendapatan.
6. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
7. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
8. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Pengakuan Pendapatan-LO.
10. Pengakuan Pendapatan-LO diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif, yaitu:
 - a. Pengakuan pendapatan yang didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus

- dibayarkan kepada pemerintah daerah. Jenis pendapatan yang termasuk dalam alternatif ini adalah Pajak Kendaraan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan atas pendapatan tersebut.
- b. Pengakuan pendapatan pajak/retribusi yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak/retribusi untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan.
 - c. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini, pembayaran diterima untuk memenuhi kewajiban di periode berjalan. Jenis pendapatan yang termasuk dalam alternative ini adalah Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha. Pendapatan-pendapatan ini diakui ketika pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.
11. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) maupun yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
 12. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
 13. Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik yang dicatat oleh SKPD maupun PPKD.

9.3.3 Belanja

1. Belanja diakui pada saat:
 - a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.
 - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
2. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

10.3.3 Transfer

1. Transfer masuk diakui pada saat bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekenin Kas Umum Daerah. Namun jika terkait dengan kurang salur, maka Pendapatan Transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi.
2. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

11.3.3 Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat..

3.4. BASIS PENGUKURAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

3.4.1 Kas

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca

3.4.2 Piutang

1. Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:
 - a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
2. Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;

b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;

c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

4. Pengukuran piutang ganti rugi dilakukan sebagai berikut:

a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

5. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang

memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

3.4.3 Penyisihan Piutang

1. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Kualitas Piutang Lancar;
 - b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c. Kualitas Piutang Diragukan;
 - d. Kualitas Piutang Macet.
2. Dengan metode persentase tertentu dari total saldo piutang yang ada, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat menentukan persentase meneliti jatuh tempo umur piutang dan cadangan piutang tak tertagih sebagai berikut:

NO	Umur Piutang	Kualitas	Taksiran Tak Tertagih
1	< 1 Tahun	Lancar	0,5%
2	1 – 2 Tahun	Kurang Lancar	10%
3	>2 – 5 Tahun	Diragukan	50%
4	>5Tahun	Macet	100%

3.4.4 Persediaan

1. Persediaan disajikan sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan

persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

- c. Nilaiwajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
2. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembang biakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama.

3.4.5 Investasi

1. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar digunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
2. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
3. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
4. Investasi jangka pendek dalam bentuk bukan surat berharga non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek, dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
5. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
6. Investasi nonpermanen dicontohkan dalam bentuk pemberian pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki secara berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

7. Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
8. Sebagai contoh, Pemerintah Daerah Provinsi NTB memberikan dana bergulir koperasi sebesar Rp. 2 milyar kepada 20 koperasi. Pemerintah Daerah Provinsi NTB mencatat investasinya sebesar Rp. 2 milyar, sesuai dengan besaran nilai bersih yang dapat direalisasikan (mengacu kepada perjanjian pada masing-masing kegiatan dana bergulir)
9. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada kegiatan pembangunan pemerintah (seperti kegiatan Pembangunan Ufront dan taxi way pada Bandara Internasional Lombok) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian kegiatan fisik sampai kegiatan tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.
10. investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
11. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
12. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi tersebut.

3.4.6 Pengukuran Aset Tetap

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan berdasarkan hasil penilaian tim penilai Pemerintah.
2. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
5. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
6. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
7. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
8. Jika penyelesaian penggerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam penggerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
9. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
10. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
11. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui

dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

12. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.
13. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
14. Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Batasan jumlah biaya untuk penentuan kapitalisasi diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
15. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan

16. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
17. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
18. Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
19. Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
20. Seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali untuk aset tetap tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya berupa buku, benda bersejarah dan cagar budaya.
21. Aset Bersejarah
22. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
23. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut.

Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Penghentian dan Penghapusan

24. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dihapuskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya.
25. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dihapuskan harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
26. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3.4.7 Aset tetap lainnya

1. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
2. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Pembebaan Penggantian Keugian (SKP2K) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
3. Sewa dan Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan set yang bersangkutan.
4. Bagun Gunas Serah dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB kepada pihak ketiga/investor untuk membangun Aset Bangun Guna Serah tersebut.
5. Bangun Serah Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Provinsi NTB ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
6. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Aset Lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif dan reklassifikasi ke dalam aset lain-lain sebesar nilai tercatat=nilai bukunya.
8. Terhadap Aset Lainnya berupa aset tak berwujud disajikan berdasarkan biaya perolehannya dikurangi amortisasi.

Amortisasi

9. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
10. Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tak Berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional.
11. Metode amortisasi dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).

3.4.8 Konstruksi dalam pengerjaan

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
 - a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
3. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
4. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
 - a. asuransi;
 - b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
5. Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama.

6. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah alokasi biaya terbesar.
7. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
8. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan

3.4.9 Kewajiban

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
2. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada surat utang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang substansinya sama dengan SUN. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
3. Pengukuran kewajiban pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis dan karakteristiknya.
4. Utang kepada pihak ketiga terjadi pada saat pemerintah menerima hak atas barang atau jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, maka pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contohnya: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan

realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

5. Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
7. Pengukuran dan penyajian utang bunga juga berlaku untuk sekuritas pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN.
8. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PKF) yang belum disetorkan kepihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
9. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Adapun yang termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
10. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

3.4.10 Ekuitas

Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban

3.4.11 Koreksi periode akuntansi sebelumnya

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul adanya: keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penetapan standard dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam situasi tertentu ,suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :
 - a. Kesalahan yang tidak berulang; dan
 - b. Kesalahan yang berulang dan sistemik.
4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang dikelompokkan dalam 2(dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
 - b. salahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi, contoh : penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
6. Setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui ada kesalahan.
7. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
Contohnya : pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersngkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.

8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
9. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain -LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya : pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain -LRA.
10. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contohnya : pengadaan aset tetap yang di mark-up dan setelah diadakan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
11. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain -LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contohnya : pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.
12. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya : penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

13. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contohnya : penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.

14. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya :

- a. Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih (koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan).

- b. kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih (koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan).

15. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Contohnya : adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.

16. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12, 13, 14, dan 16 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

17. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12, 15, dan 17 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

18. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
- Contohnya : pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.
19. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.
- Contohnya : belanja untuk membeli perabotan kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja, maka koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas.
20. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada paragraf 9 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
21. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
22. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

3.4.12 Pendapatan

1. Pendapatan LRA dan Pendapatan - LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
3. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang akan diterima dan atau akan diterima.

4. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

3.4.13 Belanja

1. Belanja diukur berdasarkan pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk belanja.
2. Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran.

Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3.4.14 Beban

1. Beban diukur berdasarkan (1) besaran timbulnya kewajiban, (2) besaran terjadinya konsumsi aset, dan (3) besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Beban diklasifikasi menurut Klasifikasi Ekonomi.

Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

3.4.15 Transfer

1. Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
2. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

3.4.16 Pembiayaan

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.

3. Akuntansi penerimaan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan.

3.5 PENYAJIAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

3.5.1 Kas

1. Kas dijurnal di sebelah debit jika bertambah dan dijurnal disebelah kredit jika berkurang.
2. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
3. Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Rincian kas dan setara kas;
 - b) Kebijakan manajemen kas dan setara kas; dan
 - c) Informasi lainnya yang dianggap penting.

3.5.2 Piutang

1. Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - b. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c. penjelasan atas penyelesaian piutang;
 - d. jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
3. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapus buku dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu

3.5.3 Persediaan

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Berikut ini adalah contoh penyajian persediaan dalam Neraca Pemerintah Daerah
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan:
 - a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - b. penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - c. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang

3.5.4 Aset Tetap

1. Aset tetap disajikan di Neraca, sebagai bagian dari aset.
2. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. Penambahan;
 - b. Penghapusan;
 - c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d. Mutasi aset tetap lainnya.
 - 3) Informasi penyusutan, meliputi:
 - a. Nilai penyusutan;
 - b. Metode penyusutan yang digunakan;
 - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan
 - 4) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 - 5) Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

3.5.5 Aset Lainnya

1. Aset Lainnya disajikan di Neraca, sebagai bagian dari aset.
2. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis Aset Lainnya, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Besaran dan rincian aset lainnya.
 - b. Kebijakan amortiasasi atas Aset Tidak Berwujud.
 - c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga.
 - d. Informasi lainnya yang penting.

3.5.6 Kewajiban

8. SKPD menyajikan semua utang jangka pendek yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di Catatan Atas Laporan Keuangan.
9. Utang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat harus diungkapkan secara rinci dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, antara lain:
 - a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
 - b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan jatuh temponya;
 - c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
 - d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;

3.5.7 Ekuitas

Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban

3.5.8 Pendapatan

1. **Pendapatan LRA** disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. **Pendapatan-LO** disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
 - a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - c. Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pendapatan yang didasarkan pada Permendagri No.13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
4. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.

3.5.9 Belanja

Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran.

Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3.5.10 Beban

Pengakuan Beban pada SKPD:

- a. Beban Pegawai

Beban Pegawai meliputi gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, beban penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, biaya pemungutan pajak daerah, honorarium PNS, honorarium non PNS, uang lembur, beban beasiswa pendidikan PNS, beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan beban pegawai BLUD. Beban pegawai dapat dilakukan dengan mekanisme UP/ GU/ TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.

Dalam konteks beban pegawai dengan mekanisme LS, akuntansi mempunyai asumsi bahwa dana SP2D dari BUD langsung diterima oleh pihak ketiga/ pihak lain yang telah ditetapkan. Dengan demikian, beban pegawai melalui mekanisme LS diasumsikan dana dari kas daerah langsung diterima oleh pegawai.

Dalam mekanisme UP/ GU/ TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (bukti pembayaran honor) telah diverifikasi oleh PPK dan disahkan PA/ KPA. Sedangkan dalam mekanisme LS, beban pegawai diakui ketika daftar gaji telah terbit dan diterima oleh PPK.

b. Beban Barang

Beban barang terdiri atas beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas. Beban barang dapat dilakukan dengan mekanisme UP/ GU/ TU ataupun dengan mekanisme LS.

Dalam mekanisme UP/ GU/ TU, beban barang diakui ketika bukti pembayaran beban kepada pihak ketiga atau bukti transaksi telah diverifikasi oleh PPK dan disahkan oleh PA/ KPA. Sedangkan dalam mekanisme LS, beban barang diakui ketika Berita Acara (yang mengindikasikan telah diterimanya barang oleh SKPD atau telah selesainya jasa yang dilakukan oleh pihak ketiga) diterima oleh panitia penerima barang.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 KOMPONEN-KOMPONEN AKUN NERACA

Neraca menggambarkan posisi Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020. Berikut ini akan diberikan penjelasan atas saldo dan perkiraan akun yang tercantum dalam Neraca per 31 Desember 2021 dan 2020.

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
4.1.1 Aset	9.205.889.526,19	9.548.251.576,19

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai akibat peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diterima oleh pemerintah, dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset tetap, dan Aset Lainnya serta Kewajiban dengan nilai disajikan sebagai berikut:

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
a. Aset Lancar	46.663.528,35	46.663.528,00
b. Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
c. Aset Tetap	9.147.894.030,84	9.490.256.080,84
d. Aset Lainnya	11.331.967,00	11.331.967,00
Jumlah	9.205.889.526,19	9.548.251.576,19

Berdasarkan rincian aset di atas terlihat bahwa terjadi penurunan aset tahun 2021 yang dimiliki oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat senilai Rp. 342.362.050,00 atau 3,59% dari nilai aset tahun 2020 disebabkan adanya pengurangan dan penyusutan nilai aset. Aset yang dimiliki oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagian besar terdiri dari aset Tetap, yaitu 99,37% dari keseluruhan aset.

Berikut diuraikan akun-akun aset yang terdapat dalam Neraca Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2021.

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
4.1.1.1 Aset Lancar	46.663.528,35	46.663.528,35

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2021 terdiri atas Kas dan Setara Kas, Piutang, Penyisihan Piutang, dan Persediaan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
a. Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
b. Piutang	19.268.027,00	19.268.027,00
c. Penyisihan Piutang	(19.268.027,00)	(19.268.027,00)
d. Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
e. Persediaan	46.663.528,35	46.663.528,35
Jumlah	46.663.528,35	46.663.528,35

Saldo Aset Lancar dalam Neraca Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB per 31 Desember 2021 senilai Rp. 46.663.528,35 sama dengan tahun 2020.

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
4.1.1.1.1 Kas	0,00	0,00

Akun ini merupakan saldo kas yang terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
a. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
b. Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
4.1.1.1.1.2 Kas di Bend.Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Nihil

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
4.1.1.1.1.3 Kas di Bend. Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan Nihil		

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
4.1.1.1.2 Piutang	19.268.027,00	19.268.027,00

Akun ini merupakan saldo Piutang tahun sebelumnya yang terdiri dari Piutang Pajak per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
a. Piutang Pajak	19.268.027,00	19.268.027,00
Jumlah	19.268.027,00	19.268.027,00

Saldo Piutang per 31 Desember 2021 senilai Rp. 19.268.027,00 tidak mengalami pergeseran dari saldo piutang per 31 Desember 2020 senilai Rp.19.268.027,00, yang keseluruhannya terdiri dari piutang pajak air bawah tanah yang merupakan sisa piutang yang tidak tertagih dan belum diserahkan ke kabupaten kota sejak tahun 2010, yang hingga saat ini belum dapat dihapuskan. (*Lampiran 2.1*).

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
4.1.1.1.3 Penyisihan Piutang	(19.268.027,00)	(19.268.027,00)

Akun ini merupakan saldo Penyisihan Piutang yang terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
a. Penyisihan Piutang Pajak	(19.268.027,00)	(19.268.027,00)
Jumlah	(19.268.027,00)	(19.268.027,00)

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 senilai Rp. (19.268.027,00) tidak mengalami perubahan dari saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2020. (*Lampiran 2.1*).

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
4.1.1.1.4 Persediaan	46.663.528,35	46.663.528,35

Akun ini merupakan saldo Persediaan yang dimiliki Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB per 31 Desember 2021, terdiri dari persediaan hibah dan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat yang belum memiliki Berita Acara Serah Terima dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
a. ATK/Cetak	0,00	0,00
b. Hibah kepada Kelompok masyarakat	0,00	0,00
c. Bantuan Sosial kepada Kelompok masyarakat	46.663.528,35	46.663.528,35
Jumlah	46.663.528,35	46.663.528,35

Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 tercantum pada (*Lampiran 7*.)

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
4.1.1.3 Aset Tetap	9.147.894.030,84	9.490.256.080,84

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing senilai Rp. 9.147.894.030,84 dan Rp. 9.490.256.080,84 dengan rincian sebagai berikut. (*Lampiran 10.1*).

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
a. Tanah	4.067.700.000,00	4.067.700.000,00
b. Peralatan dan Mesin	7.646.378.499,44	7.550.364.499,44
c. Gedung dan Bangunan	8.050.968.762,84	8.050.968.762,84
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	669.979.600,00	669.979.600,00
e. Aset Tetap Lainnya	105.573.900,00	105.573.900,00
f. Konstruksi Dalam penggerjaan	34.787.000,00	34.787.000,00
g. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(11.427.493.731,44)	(10.989.117.681,44)
Jumlah	9.147.894.030,84	9.490.256.080,84

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
4.1.1.3.1 Tanah	4.067.700.000,00	4.067.700.000,00

Nilai tanah yang disajikan tersebut merupakan nilai tanah per 31 Desember 2021.

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
4.1.1.3.2 Peralatan dan Mesin	7.646.378.499,44	7.550.364.499,44

Nilai Peralatan dan Mesin yang disajikan tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020 senilai Rp. 7.550.364.499,44

Mutasi selama tahun 2021 :

- *Penambahan:*

● Belanja Modal	Rp	64.514.000,00
● Belanja Barang dan Jasa	Rp	
● Mutasi Masuk	Rp	
● Hibah masuk	Rp	
● Aset Belum Dicatat di KIB	Rp	
● Koreksi Nilai salah Catat	Rp	
● Reklas antar KIB	Rp	
● Koreksi Tambah Nilai satu (1)	Rp	
● Reklas Masuk dari RB ke AT	Rp	
		<i>Jumlah mutasi tambah senilai</i>
		Rp. 64.514.000,00

- *Pengurangan/koreksi selama tahun 2021:*

● Penghapusan	Rp	
● Mutasi Keluar	Rp	
● Ekstra komptabel	Rp	
● Dobel Catat	Rp	
● Koreksi atas nilai Aset	Rp	
● Reklas Keluar dari AT ke ATB	Rp	
● Reklas antar KIB	Rp	
● Koreksi Tambah Nilai satu (1)	Rp	
● Barang Milik Negara (BMN)	Rp	
● Reklas Keluar dari AT ke RB	Rp	
● Hibah Keluar	Rp	
		<i>Jumlah pengurangan/koreksi</i>
		Rp -
		Rp 7.646.378.499,44

Penjelasan mutasi Peralatan dan Mesin dengan saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp. 7.646.378.499,44 (*Lampiran 10.2*) merupakan penambahan dari Belanja Modal dan Belanja Barang Jasa senilai Rp. 64.514.000,00.

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 senilai Rp. 7.646.378.499,44 tersebut terdiri dari :

- <i>Alat-alat Bantu</i>	<i>Rp. 322.820.000,00</i>
- <i>Alat Angkutan Darat Bermotor</i>	<i>Rp. 1.728.172.500,00</i>
- <i>Alat Bengkel Bermesin</i>	<i>Rp. 14.450.000,00</i>

- <i>Alat Bengkel Tak Bermesin</i>	<i>Rp.</i>	46.888.000,00
- <i>Alat Ukur</i>	<i>Rp.</i>	239.243.700,00
- <i>Alat Kantor</i>	<i>Rp.</i>	519.360.150,00
- <i>Alat Rumah Tangga</i>	<i>Rp.</i>	467.201.250,03
- <i>Komputer</i>	<i>Rp.</i>	559.748.733,00
<i>Peralatan Komputer</i>	<i>Rp.</i>	539.394.977,00
- <i>Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat</i>	<i>Rp.</i>	110.265.459,41
- <i>Alat Studio</i>	<i>Rp.</i>	391.941.130,00
- <i>Alat Komunikasi</i>	<i>Rp.</i>	58.574.000,00
- <i>Alat SAR</i>	<i>Rp.</i>	2.490.000,00
- <i>Unit-Unit Laboratorium</i>	<i>Rp.</i>	2.321.382.100,00
- <i>Alat Peraga/Praktek Sekolah</i>	<i>Rp.</i>	22.462.000,00
- <i>Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir</i>	<i>Rp.</i>	10.650.000,00
- <i>Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika</i>	<i>Rp.</i>	102.725.000,00
- <i>Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan</i>	<i>Rp.</i>	80.140.000,00
- <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)</i>	<i>Rp.</i>	58.374.500,00
- <i>Alat Laboratorium Lingkungan Hidup</i>	<i>Rp.</i>	3.445.000,00
- <i>Peralatan Laboratorium Hidrodinamika</i>	<i>Rp.</i>	46.650.000,00
<i>Jumlah</i>		7.646.378.499,44

4.1.1.3.3	Gedung dan Bangunan	2021 (Rp)	2020 (Rp)
		8.050.968.762,84	8.050.968.762,84

Nilai Gedung dan Bangunan yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2021. berdasarkan nilai tersebut nilai gedung dan bangunan tahun 2021 tidak mengalami perubahan.

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 senilai Rp. **8.050.968.762,84** tersebut terdiri dari:

- <i>Bangunan Gedung Kantor</i>	<i>Rp.</i>	6.707.464.274,84
- <i>Bangunan Gudang</i>	<i>Rp.</i>	209.591.000,00
- <i>Bangunan Gedung Tempat Ibadah</i>	<i>Rp.</i>	96.000.000,00
- <i>Bangunan Gedung Tempat Olah Raga</i>	<i>Rp.</i>	54.000.000,00
- <i>Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga</i>	<i>Rp.</i>	8.100.000,00
- <i>Bangunan Gedung Garasi/Pool</i>	<i>Rp.</i>	133.668.000,00
- <i>Bangunan Gedung Perpustakaan</i>	<i>Rp.</i>	691.200.000,00
- <i>Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya</i>	<i>Rp.</i>	150.945.488,00
<i>Jumlah</i>	<i>Rp.</i>	8.050.968.762,84

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
4.1.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan	669.979.600,00	669.979.600,00

Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2021 yang terdiri dari :

- <i>Bangunan Air Irigasi</i>	<i>Rp</i>	386.378.000
- <i>Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah</i>	<i>Rp</i>	182.497.600
- <i>Instalasi Gardu Listrik Distribusi</i>	<i>Rp</i>	101.104.000
JUMLAH	<i>Rp</i>	669.979.600

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
4.1.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	105.573.900,00	105.573.900,00

Nilai Aset Tetap Lainnya yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2021 terdiri dari Buku Umum

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
4.1.1.3.5 Konstruksi Dalam Pengerjaan	34.787.000,00	34.787.000,00

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2021.

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
4.1.1.3.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(11.427.493.731,44)	(10.989.117.681,44)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :

a. Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6.764.455.346,44)
b. Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan	(4.589.710.760,00)
c. Akum. Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(73.327.625,00)
Jumlah	(11.427.493.731,44)

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 senilai Rp. (11.427.493.731,44).

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
4.1.1.4 Aset Lainnya	11.331.967,00	11.331.967,00

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 senilai Rp. 11.331.967 terdiri dari Aset Lain-Lain. (*Lampiran 11*).

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
4.1.1.4.1 Aset Lain–Lain	11.331.967,00	11.331.967,00

Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 senilai Rp. **11.331.967,00** tidak mengalami perubahan dari nilai aset lain-lain tahun 2020 yang merupakan aset RB yang belum dapat dihapuskan.

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
4.1.2 Kewajiban	241.756.095,00	-

Nilai Kewajiban Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 241.756.095,00 berasal dari kewajiban utang jangka pendek yang terdiri dari:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
5.1.2.2 Utang Beban	241.756.095,00	-

Saldo Utang Beban merupakan kewajiban Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB yang belum dibayarkan dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Utang Beban Pegawai	241.715.795	-
2	Utang Beban Barang dan Jasa	40.300	-
3	Utang Beban Bunga	-	-
4	Utang Beban Subsidi	-	-
5	Utang Beban Hibah	-	-
6	Utang Beban Bantuan Sosial	-	-
7	Utang Beban Transfer	-	-
8	Utang Beban Lain-lain	-	-
Jumlah		241.756.095	-

Saldo Utang Beban Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB per 31 Desember 2021 senilai Rp.241.756.095 mengalami peningkatan senilai Rp.241.756.095 atau 100% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 senilai Rp.0 (*Lampiran....*)

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
4.1.3 Ekuitas	8.964.133.431,19	9.548.251.576,19

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 dan tahun 2020 masing-masing senilai Rp. 8.964.133.431,19 dan Rp. 9.548.251.576,19 adalah kekayaan bersih Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.2 KOMPONEN-KOMPONEN AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.1 Pendapatan	-	-

Pendapatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2021 dianggarkan senilai Rp. 0,- dan terealisasi senilai Rp. 0,-.

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah	-	-

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 dianggarkan senilai Rp. 0,- dan terealisasi senilai Rp. 0.

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah	-	-

Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2021 dianggarkan senilai Rp. 0,- dan terealisasi senilai Rp. 0.

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.2 Belanja	10.099.566.495,00	9.561.885.829,00

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Belanja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang/jasa, dan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal (Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan).

A. Belanja **Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat** tahun 2021 dianggarkan senilai Rp. 9.800.074.195,00 dan terealisasi senilai Rp. 9.281.450.296,00 atau 94,71%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 senilai Rp. 11.436.353.926,00 maka realisasi Belanja tahun 2021 menunjukkan penurunan senilai Rp. 2.154.903.630 atau 23,22%. Belanja tahun 2021 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	% Realisasi (Rp)	
		(Rp)	(Rp)		
1	Belanja Operasi	9.734.383.095	9.216.936.296	94,68	11.183.478.326
2	Belanja Modal	65.691.100	64.514.000	98,21	252.875.600
	Jumlah	9.800.074.195	9.281.450.296	94,7	11.436.353.926

- B. Sedangkan Belanja **Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Pulau Sumbawa** tahun 2021 dianggarkan senilai Rp. 299.492.300,00 dan terealisasi senilai Rp. 280.435.533,00 atau 93,64%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 senilai Rp. 169.300.616,00 maka realisasi Belanja tahun 2021 menunjukkan peningkatan senilai Rp. 111.134.917,00 atau 39,62%. Belanja tahun 2021 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Operasi	299.492.300	280.435.533	93,64	169.300.616
	Jumlah	299.492.300	280.435.533	93,64	169.300.616

4.2.2.1 Belanja Operasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	10.033.875.395,00	9.497.371.829,00

- A. Belanja Operasi **Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB** tahun 2021 dianggarkan senilai Rp. 9.734.383.095,00 dan terealisasi senilai Rp. 9.216.936.296,00 atau 94,68%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 senilai Rp. 11.183.478.326,00 maka realisasi Belanja Operasi tahun 2021 menunjukkan peningkatan senilai Rp. 1.996.542.030,00 atau 21,34%.
- B. Sedangkan Belanja Operasi **Cabang Dinas ESDM Wilayah Pulau Sumbawa** tahun 2021 dianggarkan senilai Rp. 299.492.300,00 dan terealisasi senilai Rp. 280.435.533,00 atau 93,64%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 senilai Rp. 169.300.616,00 maka realisasi Belanja tahun 2021 menunjukkan peningkatan senilai Rp. 111.134.917,00 atau 39,62%. Belanja Operasi tahun 2021 terdiri dari:

4.2.2.1.1 Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	7.323.075.635,00	7.180.246.442,00

Belanja Pegawai tahun 2021 dianggarkan senilai Rp. 7.323.075.635,00 dan terealisasi senilai Rp. 7.180.246.442,00 atau 98,05%, Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 senilai Rp. 6.804.735.861,00 maka realisasi Belanja Pegawai tahun 2021 menunjukkan peningkatan senilai Rp. 375.510.581 atau 5,23%. Rincian belanja pegawai sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.870.209.104,00	4.801.735.828,00	98,59	5.011.815.702,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.421.226.531,00	2.360.510.614,00	97,49	1.792.920.159,00
3	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	31.640.000,00	18.000.000,00	56,89	0,00
	Jumlah	7.323.075.635,00	7.180.246.442,00	98,05	6.804.735.861,00

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa		2.710.799.760,00	2.317.125.387,00

- A. Belanja Barang dan Jasa **Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB** tahun 2021 dianggarkan senilai Rp. 2.411.307.460,00 dan terealisasi senilai Rp.2.036.689.854,00 atau 84,46% Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 senilai Rp. 1.754.572.186,00 maka realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2021 menunjukkan Peningkatan senilai Rp. 282.117.668 atau 13,85%. Rincian Belanja Barang sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)		
1	Belanja Bahan Pakai Habis	140.569.200	122.374.900	87,06	85.148.500
2	Belanja Bahan/Material	7.823.000	7.823.000	100,00	4.400.000
3	Belanja Jasa Kantor	393.790.760	311.151.696	79,01	198.901.523
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.885.800	8.885.700	100,00	9.525.200
6	Belanja Makanan dan Minuman	22.035.000	17.508.000	79,46	8.409.000
7	Belanja Perjalanan Dinas	639.000.000	598.536.675	93,67	921.235.428
8	Belanja Pemeliharaan	165.610.000	157.835.183	95,31	7.320.500
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.337.700	6.337.700	100,00	0,00
10	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	7.000.000	0	0,00	0,00
11	Belanja Pengadaan Benda Pos	5.256.000	4.205.000	80,00	0,00
12	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada masyarakat	1.015.000.000	802.032.000	79,02	7.320.500
Jumlah		2.411.307.460	2.036.689.854	84,46	1.242.260.651

- B. Sedangkan Belanja Barang dan Jasa **Cabang Dinas ESDM Wilayah Pulau Sumbawa** tahun 2021 dianggarkan senilai Rp. 299.492.300,00 dan terealisasi senilai Rp. 280.435.533,00 atau 93,64%. Rincian Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)		
1	Belanja Bahan Pakai Habis	13.967.900	13.863.800	99,25	6.369.500
2	Belanja Jasa Kantor	173.714.400	158.491.820	91,24	98.846.116
	Biaya Cetak dan Pengadaan	0	0	0,00	1.225.000
3	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.810.000	21.809.500	100,00	2.075.000
	Belanja Honorarium PNS	0	0	0,00	11.700.000
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	90.000.000	86.270.413	95,86	49.085.000
Jumlah		299.492.300	280.435.533	93,64	169.300.616

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.2.1.3 Belanja Hibah		-

Belanja Hibah tahun 2021 tidak dianggarkan.

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial	-	-

Belanja Bantuan Sosial tahun 2021 tidak dianggarkan .

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.2.2 Belanja Modal	65.691.100,00	64.514.000,00

Belanja Modal tahun 2021 dianggarkan senilai Rp. 65.691.100,00 dan terealisasi senilai Rp. 64.514.000,00 atau 98,21%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 senilai Rp. 252.875.600,00 maka realisasi Belanja Modal tahun 2021 menunjukkan penurunan senilai Rp.188.361.600,00 atau 291,97%. Belanja Modal tahun 2021 terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran 2021 Rp.	Realisasi 2021 Rp.	%	Realisasi 2020 Rp.
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.691.100,00	64.514.000,00	98,21	70.378.000,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	182.497.600,00
Jumlah		65.691.100,00	64.514.000,00	98,21	252.875.600,00

Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis Belanja Modal dapat diuraikan sebagai berikut :

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.691.100,00	64.514.000,00

Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2021 dianggarkan senilai Rp. 65.691.100,00 dan terealisasi senilai Rp. 64.514.000,00 atau 98,21%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 senilai Rp. 70.378.000,00 maka realisasi Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2021 menunjukkan penurunan senilai Rp.5.864.000,00 atau 8,33%. Belanja Peralatan dan Mesin 2021 terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Pengadaan Alat Kantor	7.971.600	7.800.000	97,84	0
2	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (home use)	5.337.000	5.250.000	98,36	0
3	Alat Pendingin	5.382,500	4.685.000	87,04	0
4	Pengadaan Komputer	47.000.000	46.779.000	99,52	70.378.000
Jumlah		65.691.100	64.514.000	98,21	70.378.000

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.2.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-

Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2021 tidak dianggarkan. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 senilai Rp.0,00.

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.2.2.2 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2021 tidak dianggarkan. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp.182.497.600,00, karena tidak dianggarkan maka realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2021 menunjukkan penurunan 100%. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2021 terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran 2021 Rp.	Realisasi 2021 Rp.	%	Realisasi 2020 Rp.
1	Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	-	-	-	182.497.600,00
Jumlah		-	-	-	182.497.600,00

4.2.3. PEMBIAYAAN

Realisasi penerimaan pembiayaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 NIHIL.

4.3 KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN OPERASIONAL

4.3.1 Kegiatan Operasional

	Saldo 2021	Saldo 2020
4.3.1.1 Pendapatan-LO	-	39.475.822

Pendapatan-LO Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	2021
1.	Pendapatan Asli Daerah-LO	0
2.	Pendapatan Transfer-LO	0
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	0
JUMLAH		0

	Saldo 2021	Saldo 2020
4.3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	-	-

Pendapatan Asli Daerah-LO Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2021 Nihil

	Saldo 2021	Saldo 2020
4.3.1.1.2 Pendapatan Transfer-LO	-	-

Pendapatan Transfer-LO Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat Nihil

	Saldo 2021	Saldo 2020
4.3.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	-	39.475.822

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari Pendapatan Hibah – LO, Dana Darurat – LO, Pendapatan Lainnya - LO dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	2021
1.	Pendapatan Hibah - LO	0
2.	Dana Darurat - LO	0
3.	Pendapatan Lainnya - LO	0
JUMLAH		0

		Saldo 2021	Saldo 2020
4.3.1.2	Beban	10.173.303.974,00	(17.321.720.251,65)

A. Beban **Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat** senilai Rp.9.892.868.441,00 terdiri dari Beban Operasi per 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo 2021
1	Beban Operasi	9.892.868.441,00
	Jumlah	9.892.868.441,00

B. Sedangkan Beban **Cabang Dinas ESDM Wilayah Pulau Sumbawa** senilai Rp.280.435.533,00 terdiri dari Beban Operasi per 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo 2021
1	Beban Operasi	280.435.533,00
	Jumlah	280.435.533,00

	Saldo 2021	Saldo 2020
4.3.1.2.1 Beban Operasi	10.173.303.974,00	(17.321.720.251,65)

a. Beban Operasi **Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB** tahun 2021 meliputi Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, dan Beban Penyusutan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo 2021
1	<i>Beban Pegawai - LO</i>	7.394.462.237,00
2	<i>Beban Barang dan Jasa</i>	2.064.230.154,00
3	<i>Beban Penyusutan</i>	434.176.050,00
	Jumlah	9.892.868.441,00

b. Sedangkan Beban Operasi **Cabang Dinas ESDM Wilayah Pulau Sumbawa** tahun 2021 meliputi Beban Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo 2021
1	<i>Beban Barang dan Jasa</i>	280.435.533,00
	Jumlah	280.435.533,00

Penjelasan Beban Operasi per 31 Desember 2021 senilai Rp. 9.892.868.441,00 antara lain sebagai berikut :

a. Beban Pegawai per 31 Desember 2021 senilai Rp. 7.394.462.237,00 merupakan:

- <i>Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO</i>	3.737.606.360,00
- <i>Beban Tunjangan Keluarga - LO</i>	397.781.132,00
- <i>Beban Tunjangan Jabatan - LO</i>	268.200.000,00
- <i>Beban Tunjangan Fungsional - LO</i>	32.550.000,00
- <i>Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO</i>	122.410.000,00
- <i>Beban Tunjangan Beras - LO</i>	232.106.100,00
- <i>Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO</i>	11.032.128,00
- <i>Beban Pembulatan Gaji - LO</i>	50.108,00
- <i>Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO</i>	1.212.937.225,00
- <i>Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja - LO</i>	148.851.959,00
- <i>Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja - LO</i>	1.212.937.225,00
- <i>Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya</i>	18.000.000,00
JUMLAH	7.394.462.237,00

b. 1. Beban Barang/Jasa **Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB** per 31 Desember 2021 senilai Rp.2.064.230.154,00 merupakan :

- <i>Beban Alat Tulis Kantor</i>	23.630.300,00
- <i>Beban Kertas dan Cover</i>	25.882.400,00
- <i>Beban Bahan Cetak</i>	43.898.300,00
- <i>Beban Bahan Komputer</i>	37.849.600,00
- <i>Belanja Lembur</i>	59.610.000,00
- <i>Beban Makanan dan Minuman</i>	17.508.000,00
- <i>Beban Alat Listrik</i>	6.337.700,00
- <i>Beban Jasa telepon</i>	1.556.678,00
<i>Beban Tagihan Air</i>	40.300
- <i>Beban Jasa listrik</i>	64.113.883,00
- <i>Beban Bahan-Bahan Lainnya</i>	7.823.000,00
- <i>Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet</i>	18.921.135,00
- <i>Beban Jasa Tenaga Kebersihan</i>	120.000.000,00
- <i>Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi</i>	72.500.000,00
- <i>Beban Pengadaan Benda Pos</i>	4.205.000,00
- <i>Beban Pemeliharan Peralatan dan Mesin</i>	157.835.183,00
- <i>Beban Jasa Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara</i>	1.600.000,00
- <i>Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan</i>	350.000,00
- <i>Beban Persediaan untuk Dijual/Dikerahkan-Persediaan untuk Dijual/Dikerahkan kepada masyarakat</i>	802.032.000,00
- <i>Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri</i>	598.536.675,00
JUMLAH	2.064.230.154,00

2. Beban Barang/Jasa **Cabang Dinas ESDM Wilayah Pulau Sumbawa** per 31 Desember 2021 senilai Rp.**280.435.533,00** merupakan :

- <i>Beban Bahan Pakai Habis</i>	<i>13.863.800,00</i>
- <i>Beban Jasa Kantor</i>	<i>158.491.820,00</i>
- <i>Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri</i>	<i>86.270.413,00</i>
- <i>Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</i>	<i>21.809.500,00</i>
JUMLAH	280.435.533,00

c. Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2021 senilai Rp.0,00

d. Beban Penyusutan per 31 Desember 2021 senilai Rp. 434.176.050,00 merupakan :

- <i>Beban Penyusutan Alat Bantu</i>	<i>2.167.143,00</i>
- <i>Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor</i>	<i>120.443.193,00</i>
- <i>Beban Penyusutan Alat Ukur</i>	<i>2.024.733,00</i>
- <i>Beban Penyusutan Alat Kantor</i>	<i>14.549.727,00</i>
- <i>Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga</i>	<i>21.535.251,00</i>
- <i>Beban Penyusutan Komputer Unit</i>	<i>41.668.980,00</i>
- <i>Beban Penyusutan Peralatan Komputer</i>	<i>14.308.235,00</i>
- <i>Beban Penyusutan Alat Studio</i>	<i>9.719.977,00</i>
- <i>Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium</i>	<i>61.520.234,00</i>
- <i>Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah</i>	<i>1.546.600,00</i>
- <i>Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir</i>	<i>400.278,00</i>
- <i>Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika</i>	<i>6.848.333,00</i>
- <i>Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja</i>	<i>121.104.951,00</i>
- <i>Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi</i>	<i>7.727.560,00</i>
- <i>Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah</i>	<i>6.083.254,00</i>
- <i>Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik</i>	<i>2.527.601,00</i>
JUMLAH	434.176.050,00

4.3.1.2.2 Surplus/Defisit Dari Operasi	Saldo 2021	Saldo 2020
	(10.173.303,974)	(17.321.720.251,65)

4.3.2 Kegiatan Non Operasional

4.3.2.1 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	Saldo 2021	Saldo 2020
	-	-

Penjelasan **Defisit** dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO per 31 Desember 2021 nihil

	Saldo 2021	Saldo 2020
4.3.3 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	-	-
	Saldo 2020	Saldo 2020
4.3.4 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	(10.173.303,974)	(17.321.720.251,65)
	Saldo 2021	Saldo 2020
4.3.5 Surplus/Defisit-LO	(10.173.303,974)	(17.321.720.251,65)

Desfisit-LO per 31 Desember 2021 senilai Rp. **(10.173.303,974)**

4.4. KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

4.4.1 Laporan Perubahan Ekuitas

a.. Laporan Perubahan Ekuitas **Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat** Per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

Ekuitas Awal **9.548.251.576,19**

Surplus/Defisit-LO **(9.865.328.141,00)**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/

Kesalahan Mendasar :

1. *Koreksi Nilai Persediaan* **0,00**

2. *Selisih Revaluasi Aset Tetap* **0,00**

3. *Koreksi Ekuitas Lainnya* **0,00**

Kewajiban untuk dikonsolidasi **9.308.750.296,00**

Jumlah Ekuitas Akhir senilai **8.991.673.731,19**

b. Sedangkan Laporan Perubahan Ekuitas **Cabang Dinas ESDM Wilayah Pulau Sumbawa** Per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

Ekuitas Awal **0,00**

Surplus/Defisit-LO **(280.435.533,00)**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/

Kesalahan Mendasar :

1. *Koreksi Nilai Persediaan* **0,00**

2. *Selisih Revaluasi Aset Tetap* **0,00**

3. *Koreksi Ekuitas Lainnya* **0,00**

Kewajiban untuk dikonsolidasi **280.435.533,00**

Jumlah Ekuitas Akhir senilai **0,00**

BAB V
PENJELASAN ATAS
INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) tahun 2021 sebanyak 72 orang, terdiri dari 0 orang Golongan I, 21 orang Golongan II, 40 orang Golongan III dan 11 orang Golongan IV. Distribusi jumlah PNSD menurut instansi/unit kerjanya masing-masing pada, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Rekapitulasi PNS Dinas ESDM Provinsi NTB Per Golongan Keadaan 31 Desember 2021

NO.	SEKRETARIAT/BIDANG	TOTAL	GOLONGAN			
			I	II	III	IV
1	Sekretariat	35	-	16	15	4
2	Bidang Geologi dan AT	8	-	2	5	1
3	Bidang Mineral dan Batu Bara	9	-	1	6	2
4	Bidang Energi	7	-	1	5	1
5	Bidang Ketenagalistrikan	8	-	-	6	2
6	Cabang Dinas ESDM Wilayah P.Sumbawa	5	-	1	3	1
JUMLAH		72	-	21	40	11

Visi dan misi Pemerintah Provinsi NTB yang tercantum dalam Renstrada Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 dan RKPD Tahun 2019 adalah: "Mewujudkan NTB Gemilang pada tahun 2019-2023..

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi melalui pendekatan sebagai berikut :

- a. NTB Tangguh dan Mantap
- b. NTB Bersih dan Melayani
- c. NTB Sehat dan Cerdas
- d. NTB Asri dan Lestari
- e. NTB Sejahtera dan Mandiri
- f. NTB Aman dan Berkah

BAB VI

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Tahun Anggaran 2021. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta dapat memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Mataram, Januari 2022

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Lampiran

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DAFTAR SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELOUARAN
PER 31 DESEMBER 2021**

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	Saldo Awal	Tambah	Kurang	Saldo Akhir	Ket
1	2	3	4	5	6 (3+4-5)	7
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB	-	-	-	-	
	Sisa UP Belum Disetor	-	-	-	-	
	Sisa TU Belum Disetor	-	-	-	-	
	PPh Ps. 21 Belum Disetor	-	-	-	-	
	PPh Ps. 22 Belum Disetor	-	-	-	-	
	PPh Ps. 23 Belum Disetor	-	-	-	-	
	Jasa Giro Belum Disetor	-	-	-	-	
	dll					
2	Cabang Dinas ESDM Wilayah Pulau Sumbawa	-	-	-	-	
DST						
JUMLAH :		-	-	-	-	

Mataram Desember 2021

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Nusa Tenggara Barat



DR. ZAINAL ABIDIN, M.Si

NIP: 19640614 199303 1 007

Lampiran 1.2

**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DAFTAR SP2D LS DI REKENING BENDAHARA PENGELOUARAN
PER 31 DESEMBER 2021**

(dalam Rupiah)

Mataram Desember 2021

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Nusa Tenggara Barat



H. ZAINAL ABIDIN, M.Si

NIP: 19640614 199303 1 007

Lampiran 1.3

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REKAPITULASI KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN
PER 31 DESEMBER 2021

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Saldo AWAL 2020	Tambah	Kurang	Saldo 31-12-2021	Keterangan
1	2	3	4	5	6 = (3+4-5)	7
1.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat					
2.	Cabang Dinas ESDM Wilayah Pulau Sumbawa					
	Jumlah			-	-	-

N i h i l

Mataram 31 Desember 2021

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Nusa Tenggara Barat



E. ZAMZAL ABIDIN, M.Si

NIP: 19640614 199303 1 007

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DAFTAR SALDO PIUTANG PAJAK AIR BAWAH TANAH (ABT)

BERDASARKAN SKPD YANG DITERBITKAN

PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021

Lampiran : 2

NO.	KOTA/KABUPATEN DAN LAINNYA	SALDO PIUTANG 2010 Per 31-12-2021	ANGSURAN PIUTANG TAHUN 2010 YANG DI BAYARKAN TAHUN 2021												JUMLAH ANGSURAN	SALDO PIUTANG Per 31-12-2021
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES	4	5=(3-4)
1	2	3													4	5=(3-4)
1	KOTA MATARAM	4,567,362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,567,362
2	LOMBOK BARAT	6,992,140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,992,140
3	LOMBOK UTARA	504,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504,000
4	LOMBOK TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	LOMBOK TIMUR	948,180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	948,180
6	SUMBawa	1,586,040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,586,040
7	SUMBawa BARAT	415,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	415,000
8	D O M P U	899,280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	899,280
9	KOTA BIMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	B I M A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	P D A M SE-NTB	3,356,025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,356,025
	JUMLAH	19,268,027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,268,027

Mataram, 31 Desember 2021

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



W. ZAINAL ABIDIN. M.Si

NIP: 19640614 199303 1 007

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
REKAPITULASI PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Lampiran : 3

NO	SKPD / UPTD	ATK & BARANG CETAKAN	Alat Listrik	Material dan Bahan	Benda Pos	Bahan Makanan Pokok	Alat Kebersihan	Pakaian	Hibah Kepada Pihak Ketiga	SALDO
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB	-	-	-	-	-	-	-	46,663,528.35	46,663,528.35
2	Cabang Dinas ESDM Wilayah Pulau Sumbawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	46,663,528.35	46,663,528.35

Lampiran 6.1

PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REKAPITULASI ASET TETAP
PER 31 DESEMBER TAHUN 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah Aset Tetap
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat	4,067,700,000.00	7,646,378,499.44	8,050,968,762.84	669,979,600.00	105,573,900.00	34,787,000.00	20,575,387,762.28
2.	Cabang Dinas ESDM Wilayah P.Sumbawa	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		4,067,700,000.00	7,646,378,499.44	8,050,968,762.84	669,979,600.00	105,573,900.00	34,787,000.00	20,575,387,762.28

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REKAPITULASI MUTASI ASET TETAP – TANAH
PER 31 DESEMBER TAHUN 2021

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Saldo per 31-12-2020	Penambahan											
			Belanja Modal	Kapitalisasi Dari Barjas	Mutasi Masuk	Hibah Masuk	Aset Berlebih	Koreksi Salah Catat (+)	Reklas Masuk dari ATB ke AT	Reklas (+)	Koreksi Tambah Nilai Satu (1)	Reklas Masuk dari RB Ke AT	Kapitalisasi Dari BM Pemeliharaan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 4 s.d 14
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB	4,067,700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Cabang Dinas ESDM Wilayah Pulau Sumbawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	4,067,700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	SKPD	Pengurangan												Saldo per 31-12-2019	
		Penghapusan	Mutasi Keluar	Extra Comptabel	Dobel Catat	Koreksi Salah Catat (-)	Reklas Keluar dari AT ke ATB	Reklas Keluar dari AT ke P3	Reklas (-)	Koreksi Kurang Nilai Satu (1)	BMN	Reklas Keluar dari AT ke RB	Hibah Keluar	Jumlah	
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28 = 16 s.d 27	29 = 15 + 28
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,067,700,000.00
2.	Cabang Dinas ESDM Wilayah Pulau Sumbawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,067,700,000.00

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REKAPITULASI MUTASI ASET TETAP – PERALATAN DAN MESIN
PER 31 DESEMBER TAHUN 2021

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Saldo per 31-12-2020	Penambahan											
			Belanja Modal	Kapitalisasi dari Barjas	Mutasi Masuk	Hibah Masuk	Aset Berlebih	Koreksi Salah Catat (+)	Reklas Masuk dari ATB ke AT	Reklas (+)	Koreksi Tambah Nilai Satu (1)	Reklas Masuk dari RB ke AT	Kapitalisasi dari BM Pemeliharaan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB	7,581,864,499.44	64,514,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,514,000.00
2.	Cabang Dinas ESDM Wilayah Pulau Sumbawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		7,581,864,499.44	64,514,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,514,000.00

No	SKPD	Pengurangan													Saldo per 31-12-2019
		Penghapusan	Mutasi Keluar	Extra Comptabel	Dobel Catat	Koreksi Salah Catat (-)	Reklas Keluar dari AT ke ATB	Reklas Keluar dari AT ke P3	Reklas (-)	Koreksi Kurang Nilai Satu (1)	BMN	Reklas Keluar dari AT ke RB	Hibah Keluar	Jumlah	
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,646,378,499.44
	Cabang Dinas ESDM Wilayah Pulau Sumbawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,646,378,499.44

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DAFTAR MUTASI ASET TETAP – GEDUNG DAN BANGUNAN
PER 31 DESEMBER TAHUN 2021

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Saldo per 31-12-2020	Penambahan											
			Belanja Modal	Kapitalisasi Dari Barjas	Mutasi Masuk	Hibah Masuk	Aset Berlebih	Koreksi Salah Catat (+)	Reklas Masuk dari ATB Ke AT	Reklas (+)	Koreksi Tambah Nilai Satu (1)	Reklas Masuk dari RB ke AT	Kapitalisasi dari BM Pemeliharaan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB	8,050,968,762.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Cabang Dinas ESDM Wilayah Pulau Sumbawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		8,050,968,762.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	SKPD	Pengurangan													Saldo per 31-12-2019
		Penghapusan	Mutasi Keluar	Extra Comptabel	Dobel Catat	Koreksi Salah Catat (-)	Reklas Keluar dari BM ke KDP	Reklas Keluar dari AT ke P3	Reklas (-)	Koreksi Kurang Nilai Satu (1)	BMN	Reklas Keluar dari AT ke RB	Hibah Keluar	Jumlah	
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,050,968,762.84
2.	Cabang Dinas ESDM Wilayah Pulau Sumbawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,050,968,762.84

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DAFTAR MUTASI ASET TETAP – JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN
PER 31 DESEMBER TAHUN 2021

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Saldo per 31-12-2020	Penambahan											
			Belanja Modal	Kapitalisasi Dari Barjas	Mutasi Masuk	Hibah Masuk	Aset Berlebih	Koreksi Salah Catat (+)	Reklas Masuk dari ATB ke AT	Reklas (+)	Koreksi Tambah Nilai Satu (1)	Reklas Masuk dari RB Ke AT	Kapitalisasi Dari BM Pemeliharaan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB	669,979,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Cabang Dinas ESDM Wilayah Pulau Sumbawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		669,979,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	SKPD	Pengurangan													Saldo per 31-12-2019
		Penghapusan	Mutasi Keluar	Extra Comptabel	Dobel Catat	Koreksi Salah Catat (-)	Reklas Keluar dari AT ke ATB	Reklas Keluar dari AT ke P3	Reklas (-)	Koreksi Kurang Nilai Satu (1)	BMN	Reklas Keluar dari AT ke RB	Hibah Keluar	Jumlah	
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	669,979,600.00
2.	Cabang Dinas ESDM Wilayah Pulau Sumbawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	669,979,600.00

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REKAPITULASI MUTASI ASET TETAP – ASET TETAP LAINNYA
PER 31 DESEMBER TAHUN 2021

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Saldo per 31-12-2020	Penambahan											
			Belanja Modal	Kapitalisasi dari Barjas	Mutasi Masuk	Hibah Masuk	Aset Berlebih	Koreksi Salah Catat (+)	Reklas Masuk dari ATB ke AT	Reklas (+)	Koreksi Tambah Nilai Satu (1)	Reklas Masuk dari RB ke AT	Kapitalisasi dari BM Pemeliharaan	Jumlah
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB	105,573,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Cabang Dinas ESDM Wilayah Pulau Sumbawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		105,573,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	SKPD	Pengurangan													Saldo per 31-12-2019
		Penghapusan	Mutasi Keluar	Extra Comptabel	Dobel Catat	Koreksi Salah Catat (-)	Reklas Keluar dari AT ke ATB	Reklas Keluar dari AT ke P3	Reklas (-)	Koreksi Kurang Nilai Satu (1)	BMN	Reklas Keluar dari AT ke RB	Hibah Keluar	Jumlah	
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,573,900.00
2.	Cabang Dinas ESDM Wilayah Pulau Sumbawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,573,900.00

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DAFTAR MUTASI ASET TETAP – KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PER 31 DESEMBER TAHUN 2021

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Saldo per 31-12-2020	Penambahan											
			Belanja Modal	Kapitalisasi Dari Bajas	Mutasi Masuk	Hibah Masuk	Aset Berlebih	Koreksi Salah Catat (+)	Reklas Masuk dari ATB ke AT	Reklas (+)	Koreksi Tambah Nilai Satu (1)	Reklas Masuk dari RB ke AT	Kapitalisasi dari BM Pemeliharaan	Jumlah
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB	34,787,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Cabang Dinas ESDM Wilayah Pulau Sumbawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		34,787,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	SKPD	Pengurangan												Saldo per 31-12-2019	
		Penghapusan	Mutasi Keluar	Extra Comptabel	Dobel Catat	Koreksi Salah Catat (-)	Reklas Keluar dari AT ke ATB	Reklas Keluar dari AT ke P3	Reklas (-)	Koreksi Kurang Nilai Satu (1)	BMN	Reklas Keluar dari AT ke RB	Hibah Keluar	Jumlah	
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,787,000.00
2.	Cabang Dinas ESDM Wilayah Pulau Sumbawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,787,000.00

PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
REKAPITULASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER TAHUN 2021

(dalam Rupiah)

REKAPITULASI UTANG BEBAN BARANG DAN JASA
PER 31 DESEMBER 2021

NO	SKPD	UTANG BEBAN PEGAWAI	UTANG BEBAN BARANG JASA						TOTAL	KETERANGAN
		TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI	HONORARIUM PEGAWAI (PTT)	BELANJA LISTRIK	BELANJA AIR (PDAM)	BELANJA TELEPHON	BELANJA INTERNET	SURAT KABAR MAJALAH		
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB	214,215,795	15,000,000	-	-	-	-	-	229,215,795	
2	Cabang Dinas ESDM Wilayah Pulau Sumbawa	-	12,500,000	-	40,300	-	-	-	12,540,300	
JUMLAH		214,215,795	27,500,000	-	40,300	-	-	-	241,756,095	

Rekapitulasi Utang Pengadaan Barang Dan Jasa

Tahun Anggaran 2021

SKPD : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NTB

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KERTAS KERJA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PERIODE 31 DESEMBER 2021**

(dalam rupiah)